

SUAMI DITAHAN KARENA NYINYIRI WIRANTO

Istri Kolonel HS Dibela 52 Advokat

KENDARI (IM)- Sebanyak 52 pengacara siap membantu kasus hukum yang dihadapi oleh istri Kolonel HS, IPDN, terkait statusnya di media sosial. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum IPDN, Supriadi.

“Saya cuma menyampaikan saja bahwa di dalam kuasa ini yang tergabung di kantor saya, Supriadi & co, kurang-lebih sekitar 52 orang pengacara. Jadi inisiatif saya sendiri dalam hal pendampingan istri beliau (IPDN),” terangnya kepada sejumlah wartawan, Minggu (13/10).

Namun sejauh ini pihaknya juga masih menunggu terkait perkembangan kasus dari IPDN. Hingga saat ini, belum ada yang melaporkan kasus tersebut ke polisi.

“Sampai detik ini kami

belum dapat keterangan dari pihak klien langsung bahwa telah dilaporkan atau seperti apa karena kami juga masih menunggu,” ujarnya.

Meskipun belum ada pemberitahuan terkait laporan, Supriadi dan rekan lainnya telah mendalami kasus tersebut.

“Status yang disebutkan dalam posting-an itu kami sebagai kuasa hukum juga masih menganalisa terhadap status itu yang bahkan sebenarnya mungkin kami akan panggil ahli untuk bagaimana menafsirkan bagaimana dari kalimat postingan itu apakah dari klausul atau poin per poin itu dianggap telah memenuhi unsur di dalam UU ITE yang diatur di dalam UU No 19 Tahun 2016 perubahan dari UU No 11 Tahun 2008,” pungkasnya. ● han

Jelang Hari Santri, Menag Berharap Identitas Duta Perdamaian Dijaga



LUKMAN HAKIM SAIFUDIN
Menteri Agama

JAKARTA (IM) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin meminta para santri untuk menyebarkan pesan perdamaian melalui identitas diri yang selama ini ditampilkan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia.

“Selama ini santri telah berperan dengan baik menjaga pagar persatuan Indonesia. Maka dari itu santri merupakan duta perdamaian yang membarkannya kepada siapa pun, di mana pun, dan kapan pun,” kata Lukman berkomentar mengenai hari santri di Jakarta, Minggu (13/10).

Lukman mengatakan santri adalah pribadi yang mendalami agama Islam dari akar kata salam, yang artinya

kedamaian dan menjadi inti jiwa santri.

Menag mengingatkan agar santri tetap menjaga identitasnya yang harus selalu ditampilkan dalam kehidupan beragama dan bernegara. Lukman menyebutkan santri memiliki ciri khas yang didapat dari proses belajar selama di pondok yang kemudian melekat sebagai identitas.

Lebih jauh Lukman mengatakan, santri sangat menghargai perbedaan dan memiliki kecintaan luar biasa kepada tanah airnya. “Sejak hari pertama mondog, santri sudah berhadapan dengan kemajemukan. Menghargai dan menghormati itu tidak tidak berarti membenarkan apalagi mendukung,” kata Lukman.

Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri pada 22 Oktober berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2015. Penetapan tersebut merupakan penghargaan pemerintah terhadap peran para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Penetapan Hari Santri dimaksudkan agar semua elemen, khususnya para santri, dapat meladani semangat jihad cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara. ● osm



GREBEG SANTRI 2019

Sejumlah santri mengikuti kirab saat Grebeg Santri Nusantara bertajuk “Santri Nyawiji Indonesia Gumregah” di Kawasan Malioboro, Yogyakarta, Minggu (13/10). Acara yang diikuti oleh ribuan santri se-DI Yogyakarta itu menjadi rangkaian peringatan Hari Santri tahun 2019.

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan likuidasi PT. ABRAAJ INDONESIA ADVISERS (dalam likuidasi) (selanjutnya disebut “Perseroan”) berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang ditandatangani oleh para pemegang saham pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana telah dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Juli 2019 Nomor 31, dibuat dihadapan NOVITA PUSPITARINI, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini diberitahukan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada pembayaran kepada Kreditor, karena sampai efektifnya likuidasi, yaitu tanggal 27 Juni 2019, Perseroan tidak mempunyai Kreditor;
2. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi akan dibayarkan kepada para pemegang saham.

Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) b UU No.40 Tahun 2007 (UUPT).

Jakarta, 14 Oktober 2019
PT. ABRAAJ INDONESIA ADVISERS (dalam likuidasi)

Ttd
DEDYK ERYANTO NUGROHO, SH, MH, CRA
Likuidator

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PERINGATAN HARI PENGLIHATAN SEDUNIA

Petugas memeriksa kondisi mata peserta saat acara Peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2019 bertajuk “Vision First” di RSUP dr.Sardjito, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (13/10). Pemeriksaan mata gratis serta pembagian kacamata gratis bagi pelajar Sekolah Dasar yang digagas oleh Sardjito Eye Center menjadi salah satu kampanye akan pentingnya kesehatan mata.

Bamsoet Minta Pemerintah Perbarui Rumusan untuk Berantas Intoleransi

Menurut Bambang Soesatyo, perlunya bekerja sama dengan lembaga dan institusi keagamaan sebagai upaya memahami akar permasalahan agar lebih komprehensif. Dia mengatakan akan menjadi ideal jika rumusan program dan model pendekatan baru itu dilandasi kemauan baik saling merangkul dalam konteks sesama anak bangsa, untuk kemudian berdialog. Jika ada intoleransi menjadi tidak relevan lagi.

JAKARTA (IM) - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai perlunya dicari dan dijajaki rumusan program dan model pendekatan baru terkait intoleransi.

“Rongrongan terhadap kebhinnekaan sudah demikian

nyata, karena sejumlah komunitas terang-terangan menyatakan tidak lagi mencintai fakta keberagaman yang menjadi takdir bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam tahun-tahun terakhir ini, kelompok atau komunitas intoler-

eran itu terlihat di mana-mana. Di sekolah, kampus perguruan tinggi, di banyak tempat kerja, dan di banyak institusi negara atau institusi pemerintah,” kata Bamsoet kepada wartawan, Minggu (13/10).

Pemerintah dan parlemen, menurut dia, perlu menggandeng semua lembaga dan institusi keagamaan dalam upaya merangkul komunitas atau kelompok masyarakat yang menolak takdir kebhinnekaan Indonesia.

“(Karena itu saya) Mendorong pemerintah untuk memprioritaskan upaya merangkul komunitas atau kelompok masyarakat yang menolak takdir kebhinnekaan Indonesia. Rumusan pendekatan kepada kelompok atau komunitas-komunitas tersebut perlu diperbarui,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, perlunya bekerja sama dengan lembaga dan institusi keagamaan sebagai upaya memahami akar permasalahan agar lebih kompre-

hensif. Dia mengatakan akan menjadi ideal jika rumusan program dan model pendekatan baru itu dilandasi kemauan baik saling merangkul dalam konteks sesama anak bangsa, untuk kemudian berdialog. Jika ada kontinuitas dialog, kata dia, perilaku intoleransi menjadi tidak relevan lagi.

“(Karena) Pada saat yang sama, ada kekuatan lain yang menunggangi kecenderungan itu dengan mengerahkan pelaku teror. Kini, teror terhadap negara sudah menjadi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Inilah realitas masalah atau persoalan yang dihadapi Indonesia dewasa ini,” ujarnya.

Bamsoet mengatakan saat ini Indonesia memang sudah memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kemudian banyak juga tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk pejabat pemerintah, tak henti-hentinya menyerukan

perlunya menjaga kerukunan dan budaya toleran serta banyaknya kegiatan dialog lintas agama dan budaya sudah digelar. Namun, menurut dia, hal itu belum cukup.

“Publik merasakan bahwa ragam program dan pendekatan untuk mereduksi perilaku intoleransi itu belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Kecenderungan saling hina antar-kelompok atau antar-golongan bahkan makin tinggi intensitasnya. Karena itu, perlu dicari dan dijajaki rumusan program dan model pendekatan lain. Utamakan program dan pendekatan baru yang bertujuan menghilangkan saling curiga. Selama ini, dirasakan ada kebuntuan karena keengganan berdialog. Belum lagi sikap saling curiga antara negara dan komunitas-komunitas itu. Untuk tujuan ini, pemerintah dan parlemen perlu mengambil inisiatif,” tutur Bamsoet. ● han

3 Hari Geledah di Lampung Utara, KPK Sita Uang hingga Dokumen

JAKARTA (IM) - Tim KPK rupanya melakukan pengeledahan secara maraton di Kabupaten Lampung Utara sejak 9 sampai 11 Oktober 2019,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (13/10).

Total ada 13 lokasi yang digeledah KPK dalam 3 hari tersebut, termasuk rumah di-

nas dan kantor bupati hingga rumah para tersangka dalam kasus itu. Sejumlah barang bukti baru ditemukan tim KPK dalam pengeledahan tersebut.

“Dari lokasi pengeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen-dokumen proyek dan anggaran di Dinas PUPR

dan Dinas Perdagangan. Selain itu, di rumah dinas bupati disita uang Rp 54 juta dan USD2.600. Berikutnya, kami akan mempelajari lebih lanjut dokumen-dokumen dan mendalami indikasi keterkaitan uang yang ditemukan di kamar, di rumah dinas Bupati tersebut dengan fee proyek di

Lampung Utara,” kata Febri. Dalam kasus ini, KPK menjerat Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka. Dia menerima suap berkaitan dengan proyek-proyek di wilayahnya melalui tangan orang kepercayaan serta kepala dinas. ● mar

Soal Jatah Kursi Menteri, Demokrat tak Memaksa Jokowi

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat menegaskan tak memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menempatkan kader mereka di kabinet periode kedua. Waketum PD Syarifuddin Hasan mengatakan mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan Jokowi.

“Saya pikir ya, itu tidak ada seperti itu (memaksa). Pada prinsipnya Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih,” kata Syarif, Minggu (13/10).

PD sendiri diketahui telah mengajukan 14 konsep program kepada Jokowi. Syarif sempat mengatakan Jokowi merespons konsep-konsep yang ditawarkan PD dengan baik.

“Ya pun menyebut PD tulus membantu Jokowi. Syarif mengatakan PD tak masalah jika konsep itu dipakai, meski mereka tak mendapatkan kursi menteri. “Ya boleh (dipakai). Itu kan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.

Sementara Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin menyebutkan saat ini susunan kabinet masih disempurnakan. “Seka-

rang masih disempurnakan,” ujar Ma'ruf di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (13/10).

Ma'ruf mengatakan susunan kabinet akan diumumkan pada waktunya. Dia meminta semua pihak menunggu. “Itu nanti pada saatnya, tunggu aja. Pasti pada saatnya diumumkan pasti,” tuturnya.

Terkait persiapan pelantikannya pada 20 Oktober 2019, dia mengaku tidak mempersiapkan diri secara khusus. “Pelantikan persiapannya, persiapan dilantik saja,” tuturnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan mengingatkan Gerindra dan Demokrat agar tak berorientasi mendapatkan kursi menteri. PDIP menilai bergabung dengan koalisi pemerintah bukan berarti akan mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet Jokowi.

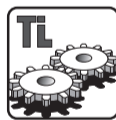
“Bergabung dengan koalisi tidak selalu harus mendapat jatah menteri. Koalisi adalah persekutuan kesepahaman platform politik untuk tujuan politik yang sama,” kata politikus senior PDIP Andreas Hugo Parreira, Sabtu (12/10). ● osm

PENGUMUMAN

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Persada Timur Plantation, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 24 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat oleh Herdimansyah Chaidiriyah S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi Perseroan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2019 dan menunjuk Ibu Widya Pravitarsari Hartanto selaku Likuidator yang akan melakukan penyelesaian mengenai pembubaran sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini memberitahukan kepada seluruh kreditor Perseroan untuk menyelesaikan segenap masalah utang piutang (jika ada) dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini

Jakarta, 14 Oktober 2019
Likuidator
PT Persada Timur Plantation



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRIWIRA INSANLESTARI Tbk

Dengan ini Direksi PT. Triwira Insanlestari Tbk (“Perseroan”) mengundang rapat para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). Yang selanjutnya disebut sebagai (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 23 Oktober 2019
Waktu : 10.00 – selesai
Tempat : Oakroom, Oakwood Mega Kuningan Lt 3 Jalan Mega Kuningan Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat Sebagai Berikut :

1. Persetujuan Rencana Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material)
2. Persetujuan Penggabungan dan / atau Peleburan Usaha (Penggabungan atau peleburan Usaha)
3. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham/Perseroan pada Hari Selasa, 06 Agustus 2019 di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora dan /atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada hari Selasa 06 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 Wib
3. Bagi pemegang Saham Perseroan yang sahnya yang dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, konfirmasi tertulis untuk Rapat dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana para Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
4. Bagi pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa Para Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jln Kirana Avenue Blok F3 No. 5 Kelapa Gading –Jakarta Utara 14250 Indonesia
6. Semua Surat Kuasa yang diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa 08 September 2019 sampai pukul 16.00 Wib melalui Kantor BAE PT. Adimitra Jasa Korpora.
 - a. Para Pemegang Saham atau para kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang member kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pension agar membawa fotokopi anggaran dasar yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya badan hukum tersebut.
7. Bahan mata cara Rapat tersedia sejak tanggal panggilan Rapat Sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019. Bahan mata acara Rapat bisa diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan.
8. Untuk memudahkan pengaturan dan teribnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada ditempat Rapat Selamb-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat di Mulai

Jakarta, 14 Oktober 2019
PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk.
Direksi